

346.02  
HAR  
P 4

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT**

*(Studi Kasus Sengketa antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari  
Aripan Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)*

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Gelar Pascasarjana S-2**

**Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Oleh :**

**HARISMAN, SH  
B4B 002101**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2004**

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT**  
*(Sengketa antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari  
Aripan Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)*

**Tesis**

Oleh :

**HARISMAN, SH**  
**B4B 002101**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 15 Oktober 2004  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



**Prof. IGN. Sugangga, SH**  
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Prof. IGN. Sugangga, SH**  
NIP. 130 359 063

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Oktober 2004

**Harisman, SH**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penulis untuk meraih gelar kesarjanaan Megister Kenotariatan, tidak lupa penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini hanya semata-mata karena rido-Nya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat S2 pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Selama proses penulisan tesis yang berjudul : **PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH ULAYAT** (*Studi Kasus Sengketa antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat*), sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penulis untuk menilainya. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputra, Sp, PD (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus dosen pembimbing utama, previewer proposal dan dosen penguji tesis.
4. Bapak R. Suharto, SH, MHum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus previewer proposal.
5. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH selaku previewer proposal sekaligus dosen penguji tesis penulis.
6. Bapak Sukirno, SH, MSi. selaku previewer proposal sekaligus dosen penguji penulis.
7. Ibu Ana Silviana, SH, MHum. selaku previewer proposal sekaligus dosen penguji penulis.
8. Para Guru Besar, Staf Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Keluarga besar Bapak/Ibu Soegatno yang telah memberikan bimbingan, dorongan serta nasehat-nasehat selama penulis berdomisili di Semarang sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2001, 2002, 2003, 2004 yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini, khususnya Ikatan Keluarga Mahasiswa-mahasiswi Kenotariatan Minang Maimbau Tegalsari Barat Barak 22 dan 29 di Semarang.

11. Seseorang yang kucintai dan kusayangi Istriku Mira Setyanti, SH., NOTARIS / PPAT di Kabupaten Pati. yang selama studi di Semarang yang telah ikut memberikan dorongan, pemikiran dan semangat baik suka maupun duka kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada Ayahanda *Letkol Pol Purnawirawan Amanoellah [alm]* dan Ibunda *Asrial* yang tercinta karena dengan ketabahan dan pengorbanannya telah membesarkan, serta mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan sempurna.

Tak lupa kuucapkan terima kasih juga kepada semua Kakak-Kakak (*Aswita Leyten, Lazuardi, Novriality, Elyanora, Darius Aman*) dan Adikku (*Muharzah Abeng Dan Ivan Heriko(alm)*) yang tersayang, serta kakak ipar (*Robert Leyten, Yulianda, Syafrizal Ucok, Novrianes dan Bahrida*) dan keponakan-keponakanku (*Vika, Carla, Ronald, Alexander, Jeff, Wely, Erick, Fabiola, Olin, Benton, Ella dan Tedy*) yang Om sayangi.

Tiada lain yang dapat penulis perbuat hanyalah berdoa, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan balasan atas segala budi baik dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin...

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya,

untuk itu penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi menuju kesempurnaan tesis ini.

*Wassalam ...*

Semarang, Oktober 2004

**Harisman, SH**

## ABSTRAK

### PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT

*(Studi Kasus Sengketa antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat)*

Dewasa ini di Propinsi Sumatera Barat sering terjadi sengketa tanah ulayat. Sengketa itu dilatar belakangi oleh kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat tersebut. Salah satu kasus yang terjadi sehubungan tanah ulayat adalah sengketa tanah ulayat kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian. Dimana telah terjadi suatu peristiwa pembakaran ,pengrusakan rumah dan kebun waga Nagari Kuncir yang terjadi pada hari selasa tanggal 28 Maret 2000 pukul 08:30 WIB oleh warga Nagari Arian dengan cara melakukan penyerbuan dan tindakan brutal, karena masyarakat Nagari Arian menganggap bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik masyarakat Nagari Arian.

Untuk menjawab permasalahan tentang penyebab utama yang menimbulkan sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajolelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian dan peranan serta cara Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta studi lapangan melalui pengamatan wawancara, serta teknik analisa datanya dilakukan secara walitatif.

Sehubungan dengan sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian, sengketa ini terjadi karena kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat tersebut dan tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya serta tidak berfungsinya Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Hal ini dapat dilihat dalam tindakan masyarakat Nagari Arian yang dapat merugikan masyarakat Nagari Kuncir karena tanpa mengadakan suatu musyawarah untuk menempuh upaya perdamaian tanpa ada kekerasan.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian oleh Kerapatan Adat Nagari, dimana masing-masing nagari melakukan musyawarah namun tidak ada suatu kesepakatan yang diinginkan oleh masing-masing Kerapatan Adat Nagari. Keputusan akhir penyelesaian sengketa tersebut diperoleh dalam musyawarah digedung DPRD Kabupaten Solok yang dihadiri oleh wakil kedua pengurus Kerapatan Adat Nagari, Muspida Kabupaten Solok dan pimpinan DPRD yang mana masing-masing pihak dapat menerima keputusan musyawarah tersebut.



## ABSTRACT

### INFLUENCE OF KERAPATAN ADAT NAGARI (NAGARI CUSTOM BROTHERHOOD) IN FINISHING THE ULAYAT LAND DISPUTE

(A Case Study on Dispute between Nagari Kuncir clan and Society of Nagari Arian of Solok Regency of West Sumatera Province)

By: Harisman, SH  
NIM.B4B 002101

At present in West Sumatera province there have been Ulayat land disputes. The disputes are due to the legal land borders in-clarity. One of the cases was the dispute of the Ulayat land of Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir clan against Nagari Arian society. There had been destruction and burning toward houses and orchards of Nagari Kuncir people on Tuesday, 28 of March 2000 at 08.30 a.m. (Western Indonesian Time) by Nagari Arian people since they assumed that the disputed land is theirs.

To determine problem on main motif caused *t-rlayut* land dispute between Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir clan and Nagari Arian people, and influence, and the Nagari custom discussion in deciding the problem, the writer used juridical-empirical approach by collecting either or secondary primary data and law materials, field research by interview, and data analysis technique was conducted qualitatively.

The dispute happened due to the legal land borders in-clarity and due to in-competency of *mamak kepala waris* (beneficiary-in-chief) in his clan and due to malfunction of *lembaga Kepalan Adat Nagari* (Nagari Custom Brotherhood Board). This could be viewed in action done by Nagari Arian people that caused loss toward Nagari Kuncir people that was not based on traditional discussion to gain peaceful agreement.

Solving on the ulayat land dispute of Dt. Rajo t,elo Nagari Kuncir and Nagari Arian people done by *Kerapatarn Adat Nagari* (Adat Nagari Brotherhood) did not result in any important agreement though each nuguri had held internal meeting. Final decision was gained in meeting in House of Representative of Solok regency attended by representatives of the both *nagari* play rule in *Kerapatarn Adat Nagari*, *Muspida* (mlmicipal authority) of Solok regency and head of House of Representative. The result was each party accepted the agreement.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kontribusi Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat .....	11
2.1.1. Pengertian Tanah Ulayat .....	11
2.1.2. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau.....	13
2.1.3. Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Ulayat .....	15
2.1.4. Yang Berhak atas Tanah Ulayat .....	18
2.1.5. Fungsi dan Tujuan Tanah Ulayat .....	21
2.1.6. Peralihan .....	25

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kerapatan Adat Nagari .....	27
2.2.1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari .....	27
2.2.2. Wewenang Kerapatan Adat Nagari .....	30
2.2.3. Tujuan Adanya Lembaga Kerapatan Adat Nagari .....	32

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan .....	40
3.2. Spesifikasi Penelitian .....	41
3.3. Lokasi Penelitian .....	41
3.4. Sumber Data .....	41
3.5. Populasi dan Sampel .....	43
3.4... Metode Analisis Data .....	45

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian .....	47
4.1.1. Kedudukan Batas-batas Tanah Ulayat yang Disengketakan antara Kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Arian .....	47
4.1.2. Sejarah Persengketaan Tanah Ulayat antara Kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Arian .....	50
4.1.3. Motivasi Masyarakat Nagari Arian dalam Persengketaan Tanah Ulayat Tersebut .....	53

4.1.4. Akibat Hukum dari Tindakan Masyarakat Nagari Aripan dalam Mengambil Alih Tanah Ulayat Secara Paksa .....	55
4.2. Pembahasan .....	58
4.2.1. Beberapa Jenis Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Solok pada Umumnya .....	58
4.2.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Dt. Rajo Lelo di Kabupaten Solok .....	60
4.2.3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Dt. Rajo Lelo oleh Kerapatan Adat Nagari .....	67
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan .....	70
5.2. Saran-saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Perincian Kerugian Akibat Tindakan Brutal Segerombolan Masa ( $\pm$  500 orang)
2. Data Rincian Kerugian Kinar E. dan Sumardi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa tanah ulayat merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di daerah Sumatera Barat. Bahwa tanah ulayat ini tidak mempunyai surat bukti hak atas tanah atau sertipikat, karena hukum adat tidak mengenal bukti tertulis.

Dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di dalamnya dicantumkan bahwa tanah seluruh Indonesia didaftarkan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

Menurut Adat Minangkabau tanah ulayat pada prinsipnya tidak boleh diasingkan karena tanah ulayat merupakan milik bersama, tidak boleh dipecah-pecah kepemilikannya dengan kata lain tidak boleh dipindahtangankan, namun tanah ulayat boleh didaftarkan demi untuk kepastian hak bagi pemegangnya.

Dewasa ini di Propinsi Sumatera Barat sering terjadi sengketa tanah ulayat. Sengketa itu dilatarbelakangi kurang jelasnya batas sepadan tanah

ulayat tersebut. Untuk mencegah berlanjutnya masalah batas sepadan tanah ulayat, maka tanah perlu didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika masalah pendaftaran tanah tersebut dihubungkan dengan status tanah yang ada, maka terdapat dua macam hak atas tanah menurut hukum adat yaitu hak atas tanah Pusako Tinggi dan hak atas tanah Pusako Rendah.

- Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki kaum, hak penggunaannya secara temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya.
- Harta pusako rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta diterimanya dari satu angkatan di atasnya.

Masalah sengketa tanah yang berasal dari hak atas tanah pusako tinggi atau tanah ulayat inilah yang banyak menimbulkan sengketa tanah di dalam masyarakat hukum adat. Adapun penyebab timbulnya masalah antara lain :

1. Kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah
3. Tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.

Masalah ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini ditempuh. Peran Ninik Mamak atau fungsionaris adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat.

Negeri di Minangkabau dianggap sebagai daerah yang mempunyai sifat istimewa, demikian bunyi penjelasan II Pasal 18 UUD 1945.

Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut *Ninik Mamak*.

Kehidupan berkaum, bersuku dan bernagari terikat kepada alam pikir komunal yang berkeseimbangan di semua lapangan kehidupan, diantaranya di bidang pertanahan, yaitu tanah ulayat.

Menurut adat Minangkabau tanah ulayat dibagi atas tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, salah satu tugas Penghulu adalah memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat suku atau kaum, yang disebut juga Tanah Pusako Tinggi, selanjutnya berkewajiban mewariskan kepada generasi



berikutnya dalam keadaan utuh. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat tersebut penghulu berkewajiban menyelesaikannya.

Di nagari secara bersama-sama Ninik Mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengurus dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari baik bagi anak nagari yang ingin memanfaatkannya maupun bagi pihak lain yang ingin menanam modalnya.

Baik penghulu maupun Ninik Mamak dalam melaksanakan tugasnya memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat serta penyelesaian sengketa diharapkan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh adat, sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut : sifat *siddik* (benar), *tabliq* (menyampaikan), *amanah* (kepercayaan) dan *futanah* (kesempurnaan cerdas dalam memelihara Agama dan harta).

Cerdik artinya orang yang mampu membayar hutang, membayar hutang kepada anak-kemanakan, membayar hutang terhadap korong kampung, membayar hutang kepada nagari dan membayar hutang kepada Tuhannya.

Cerdik itu ada beberapa macam, yaitu cerdas dakwa jawab, cerdas kaji-mengaji, cerdas kecek-mangecek, cerdas candokio, cerdas tipu dayo, cerdas puta kulin, cerdas baraka, cerdas barang tiap-tiap sesuatu.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak.

Lembaga adat ini keberadaannya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari.

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain, mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum.

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat, ada yang berpendapat sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan mereka berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, *nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro*.

Di lain pihak menyatakan bahwa sengketa tanah ulayat terlebih dulu diselesaikan oleh KAN setempat, apabila para pihak yang bersengketa tidak merasa puas, dapat mengajukan ke pengadilan.

Adapula yang berpendapat, sengketa tanah ulayat tak perlu diselesaikan oleh KAN setempat, para pihak langsung mengajukan ke pengadilan, alasan mereka berdasarkan pengalaman. Perkara tanah ulayat, yang diajukan ke KAN, biasanya KAN tidak mau menyelesaikannya.<sup>1</sup>

Oleh karena itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah tesis dengan judul : **“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT (Studi Kasus Sengketa antara Kaum Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat).”**

## **1.2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat

---

<sup>1</sup> H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah Disampaikan pada Pelatihan Pemantapan Administrasi Manajemen Kelembagaan Adat Alam Minangkabau. Bagi Pengurus KAN, Penghulu Suku, LKAAM dan Bundo Kandung se-Kota Padang. Tanggal 21- 31 Agustus 2000, hal. 7 – 8.

Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa penyebab utama yang menimbulkan sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian ?
2. Bagaimanakah cara Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap apa yang kita teliti harus mempunyai suatu tujuan. Beranjak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui cara Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi *teoritis*, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi *pragmatis*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi pemerintah Kabupaten Solok khususnya bagi Nagari Kunci dan Nagari Arian.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian tesis ini, perlu adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

**Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang tanah ulayat yang berisi pengertian tanah

ulayat, macam-macam tanah ulayat di Minangkabau, hubungan masyarakat hukum adat dan hak ulayat, yang berhak atas tanah ulayat, fungsi dan tujuan tanah ulayat dan peralihan. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai Tinjauan umum tentang Kerapatan Adat Nagari yang berisikan tentang pengertian, wewenang, dan tujuan adanya lembaga Kerapatan Adat Nagari.

**Bab III Metodologi Penelitian**, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang kedudukan batas-batas tanah ulayat yang disengketakan antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian, Sejarah persengketaan tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Arian, motivasi masyarakat Nagari Arian dalam persengketaan tanah ulayat tersebut, dan akibat hukum dari tindakan masyarakat Nagari Arian dalam mengambil alih tanah ulayat secara paksa. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pembahasan yang berisi beberapa jenis sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Solok pada umumnya, penyelesaian

sengketa tanah ulayat kaum Dt. Rajo Lelo di Kabupaten Solok, dan penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum Dt. Rajo Lelo oleh Kerapatan Adat Nagari.

**Bab V Penutup**, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat**

##### **2.1.1. Pengertian Tanah Ulayat**

Pengertian tanah ulayat atau tanah adat sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 (PERDA No. 13/1983) tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Sumatera Barat dalam Pasal 1 huruf e menyatakan : “Tanah ulayat adalah tanah yang berada di nagari yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.”

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 dicabut oleh Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari namun Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 Pasal 1 huruf O hanya menyebutkan pengertian Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari di luar kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari.



Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, tanah nagari maupun tanah ulayat yang berada di nagari termasuk kekayaan nagari.

Pengertian lain yang dikemukakan oleh para ahli adalah :

1. Hilman Hadikusuma

Tanah Adat/kerabat merupakan milik bersama (kerabat-sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh Menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi milik perseorangan.<sup>2</sup>

2. Herman Sihombing dalam prasarannya pada simposium tanah Adat/Ulayat

Dalam Pembangunan, tanggal 7 sampai 11 September 1971 di Padang menyatakan :<sup>3</sup>

a. Secara teoritis

Tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap atau dipakai.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982, hal. 119.

<sup>3</sup> Herman Sihombing, Prasarannya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan, tanggal 7 – 11 Septembere 1971 di Padang.

b. Secara riil

Tanah ulayat adalah tanah cadangan kaum/paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.

3. H. Nurullah Dt. Papatih Nan Tuo

Tanah ulayat adalah segala sesuatu yang terdapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.<sup>4</sup>

Pengertian tanah ulayat menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah milik yang diatur oleh hukum adat.<sup>5</sup>

### 2.1.2. Macam-macam Tanah Ulayat di Minangkabau

Menurut ajaran adat Minangkabau tanah ulayat dibagi atas :<sup>6</sup>

1. Tanah Ulayat Rajo, ialah tanah ulayat yang penguasanya penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan rimba, bukti dan gunung,

---

<sup>4</sup> Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT Singalang Press, Padang, 1999, hal. 7.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 1995, hal. 10.

<sup>6</sup> Nurullah, *Op. cit.*, hal. 8.

padang dan belukar, rawat dan paya, sungai dan danau serta laut dan telaga.

Menurut pendapat Narullah Dt. Papatih Nan Tuo, dikatakan tanah ulayat Rajo adalah karena tanah ulayat yang dikuasai oleh beberapa Nagari. Penguasaan oleh nagari-nagari dapat dilakukan dengan manaruko atau membuka lahan baru.

2. Tanah Ulayat nagari, ialah tanah yang letaknya dekat dari kampung. Tanah ini penguasanya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang ilalang, semak belukar atau padang rumput, sungai, danau dan sebagainya. Batas tanah ulayat Rajo maupun ulayat nagari ditentukan oleh batas alam. Adat menyebutnya :

*Ka Bukik Baguilang aia,  
Ka Lurah Baanak Sungai*

Maksudnya adalah :

Ke bukit Berguling Air  
Ke Lurah Beranak Sungai

Dalam adat disebut hutan jauh diulangi (sering dikunjungi), hutan dakek dikundanoi (dimanfaatkan). Baik tanah ulayat Rajo maupun tanah ulayat Nagari harus sering dikunjungi.

Penguasa tanah ulayat ini tergantung kepada sistem pemerintahan adat yang berlaku, yaitu sistem rang koto piliang atau sistem pemerintahan Bodi Caniago. Menurut sistem pemerintahan koto piliang tanah ulayat tersebut dikuasai oleh penghulu pucuk sedangkan sistem pemerintahan Bodi Caniago penguasa tanah ulayat ialah penghulu-penghulu dalam nagari.

3. Tanah Ulayat Suku ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasanya adalah Penghulu Suku.
4. Tanah Ulayat Kaum ialah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah Penghulu Kaum atau Mamak Kepala Waris. Dalam kenyataan sekarang tanah ulayat kaum lebih menonjol dari pada tanah ulayat suku. Tanah ulayat kaum ini sering disebut tanah pusako tinggi karena tidak dikenal lagi siapa pemiliknya.

### **2.1.3. Hubungan Masyarakat Hukum Adat dengan Hak Ulayat**

Dalam membicarakan tanah adat atau tanah ulayat mau tidak mau kita harus membicarakan masalah masyarakat hukum adat itu sendiri, karena tanah

adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat yang menempatinnya.

Menurut B. Teer Haar Bzn, yang dimaksud dengan masyarakat dalam persekutuan hukum adat adalah suatu kesatuan (*Unieenheid*) dan dapat dilihat sebagai masyarakat hukum adat secara individual adalah kelompok memungut hasil dari daerah atau tanah persekutuan itu.

Sebagaimana telah kita ketahui, tanah ulayat adalah merupakan bagian dari masyarakat hukum adat. Bagaimanapun hukum adat tentunya memegang peranan penting, baik dalam segi penggunaannya maupun dalam segi peraturannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan adanya hubungan tanah ulayat dengan hukum adat sebagai berikut “bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak-hak ulayat yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Dari penjelasan di atas jelas bagi kita, bahwa hukum positif kita masih mengakui adanya tanah ulayat. Karena dari pasal-pasal di atas, begitu juga pasal-pasal lainnya dan Undang-Undang Pokok Agraria masih terdapat kita lihat adanya hubungan dengan masalah yang berdasarkan kepada hukum adat. Kemudian kita kembali kepada pokok permasalahan mengenai tanah ulayat yang hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang merupakan unsur yang esensial dari pihak adat itu sendiri. Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bagaimanapun tidak dapat dipisahkan antara hukum adat dengan masyarakatnya, karena masyarakat hukum adat dengan haknya sebagai salah satu daripada anggota dan sekaligus mempunyai hak-hak ulayat yang secara bersama-sama masih utuh dalam pengelolaannya.

Kalau seandainya anggota kaum itu ingin untuk mengelola tanah dan mengambil manfaat dari tanah yang akan diolah tersebut, maka terlebih dahulu mereka harus meminta izin kepada mamak kepala waris, karena di dalam hal ini mamak kepala warislah yang berhak menentukan dan mengaturnya, sebagaimana pepatah adat mengatakan bahwa mamak kepala waris adalah :

*Orang yang didahulukan selangkah  
dan ditinggikan seranting.*

Yang dimaksud dengan pepatah di atas adalah mamak kepala waris orang yang dihormati kaumnya sendiri. Kemudian di lain pihak dapat pula kita lihat betapa kuatnya sendi/dasar pada hukum adat itu yang tertuang dalam tambo adat yang menyatakan :

*“Adat Basandi Syara” Basandi Kitabullah”*

Yang dimaksud *“Adat Basandi Syara”* adalah adat tersebut bersandikan kepada peraturan-peraturan agama yaitu agama Islam. Sedangkan *“Syara”* Basandi. Kitabullah adalah syara’ tersebut berlandaskan pada kitab suci Al-Qur’an yang merupakan sumber dari ajaran agama Islam. Jadi kalau Al-Quran sebagai sumbernya, maka dalam hal ini tiada lagi yang paling tinggi sumber hukum selain dari Al-Qur’an, karena Al-Qur’an merupakan peraturan dan petunjuk yang mengatur dan menyelamatkan umat manusia yang beriman baik dunia maupun akhirat.

#### **2.1.4. Yang Berhak Atas Tanah Ulayat**

Tanah dalam Adat Minangkabau merupakan harta pusaka yang utama karena dianggap merupakan suatu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bernegeri. Seseorang mempunyai tanah asal dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran di dalam negeri.

Tanah dibagi atas 2 macam

- a. Hutan Tinggi
- b. Hutan Rendah

Hutan tinggi adalah tanah yang belum diolah dan belum dijadikan lahan pertanian, walaupun tanah ini dapat juga dipungut hasilnya namun hasil tersebut bukanlah hasil dari perbuatan manusia yang mana telah ada sejak dulunya.

Sedangkan hutan rendah adalah merupakan segala tanah yang telah digarap dan diusahakan/diolah dijadikan tanah pertanian oleh nenek moyang terdahulu secara mencancang dan melatih tanah sehingga hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh nenek moyang tersebut. Tanah itu diberikan kepada seluruh anggota keluarga secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaum itu. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tanah ulayat merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang berada di Minangkabau atas penguasaan seorang penghulu kaum.



Menyangkut dengan pengertian ini, Muchtar Naim menjelaskan : “Di luar harta pusaka dalam bentuk yang telah menjelma menjadi *ganggam/beruntuk, pagang/bamasiang*”, artinya : “Ulayat suku yang dipegang oleh para penghulu bersama-sama dalam Nagari atau penghulu dalam suku.”<sup>7</sup>

Tanah ulayat milik semua anggota masyarakat kaum dipegang oleh seorang penghulu kaum yang “ditinggikan seranting didahulukan selangkah”, maksudnya seorang pemimpin di dalam masyarakat satu kaum untuk membimbing anak kemenakan di dalam kaum.

Tanah ulayat diperuntukkan bagi seluruh anggota masyarakat kaum diolah diusahakan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian anggota masyarakat dan menikmati hasil dari apa yang telah diusahakan tersebut. Dengan berkembangnya anggota dalam kaum maka setiap anggota kaum berhak untuk menambah areal pertanian hutan tinggi itu dengan cara ditaruko yang memang menurut asalnya berfungsi sebagai cadangan bagi perkembangan anak cucu di masa yang akan datang. Tanah hutan tinggi yang ditaruko tersebut akan menjadi hak olah bagi yang menaruko dengan bentuk

---

<sup>7</sup> H. Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Sekretariat LAAM, Sumbar, Padang.

ganggam beruntuk sesuai dengan janji dengan penguasa tanah ulayat dalam hal ini penghulu kaum sewaktu mendapatkan tanah ulayat itu. Dan apabila tanah yang ditaruko tersebut tidak dipergunakan lagi maka akan dikembalikan kepada bentuknya semula yaitu kembali menjadi tanah ulayat kaum, sesuai dengan pepatah adat : *“Kerbau tegak, kubangan tinggal”* dan *“Tanjung putus pulau beralih”* yang artinya bahwa tanah ulayat yang telah ditaruko tidak dimanfaatkan lagi oleh orang yang menaruko dikembalikan menjadi tanah ulayat kaum.

Orang luar (bukan anggota masyarakat) dapat pula menikmati hasil dan manfaat tanah ulayat dengan hak pakai, hanya dalam hal ini pihak luar tersebut memenuhi ketentuan adat secara *“Mengisi adat menuang limbago”*, yaitu dengan memberikan imbalan kepada penghulu kaum selaku penguasa tanah ulayat.

#### **2.1.5. Fungsi dan Tujuan Tanah Ulayat**

Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti : tanah, rumah, suku dan Nagari. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budi daya manusia itu sendiri.

Setiap manusia, secara bersama atau sendiri-sendiri, memerlukan tanah, rumah, suku dan Nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batin.

Sebagaimana yang telah diketahui juga bahwa masyarakat Minangkabau sejak dahulu adalah masyarakat yang agraris atau bercocok tanam (pertanian). Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka.

Kaum atau seorang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang yang kurang atau sebagai pendatang di Minangkabau.

Sehubungan dengan masalah tersebut oleh A.A. Navis mengemukakan :

Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat, sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai terlantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.<sup>8</sup>

Nenek moyang orang Minangkabau sejak dahulu sangat memikirkan tentang kelanjutan anak kemenakannya di masa datang. Mereka telah

---

<sup>8</sup> A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Penerbit PT. Grafiti, Jakarta, 1984, hal 150.

menggariskan bahwa pemanfaatan tanah ulayat kaum atau tanah ulayat nagari ditujukan untuk memberi nafkah dan kesejahteraan kepada anggota kaum dan masyarakat Nagari.

Sedangkan tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya tanah ulayat itu, barangkali pada waktu itu belum sempat diolah baik untuk pertanian, ataupun tanaman lainnya, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan.

Ekonomi ini adalah suatu syarat yang mutlak bagi suatu kaum pada khususnya dan bagi satu bangsa pada umumnya, maka adat Minangkabau semenjak dahulu sampai sekarang telah menyusun ekonomi masyarakat demi kepentingan kehidupan masyarakat sebagai yang tersimpul dalam pepatah adat : “Sawah ladang banda buatan”, antara lain berbunyi :

*Sasukek duo baleh taie, disukek mako digantang  
nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang  
kok sawah lah bapiriang, ladanglah babidang-bidang  
sawah batumpah di nan data, ladang di bidang di nan lereang  
banda baliku taruih ka bukik, tambilang basi urang tuo  
cancang latiah nenek moyang, sawahlah sudah jo lantaknyo  
Ladang lah sudah jo ranjnyo, dikarajokan jo gotong royong (barek  
sapikan ringan sajinjing).*

(Sesukat dua belas tail, disukat maka digantang  
 yang lunak ditanam benih, yang keras dibuat ladang  
 Bila sawah sudah dipiring, ladang sudah berbidang-bidang  
 Sawah terletak berliku sampai ke bukit, terbilang besi orang tua  
 Cencang letih nenek moyang, sawah dengan ladang sudah dengan  
 paritnya.  
 Ladang sudah siap dengan ranjinya, dierjakan dengan gotong-royong  
 (berat sama dipikul ringan sama dijinjing)

Sekarang tinggal lagi bagi generasi muda yang ada pada saat ini sejauh  
 mana ia mampu memelihara dan meningkatkan pengolahan lahan-lahan sawah,  
 hutan-hutan yang aktif bisa produktif dan menghasilkan.

Sawah nan bapiriang, ladang nan badobang oleh penghulu-penghulu  
 sekarang bersama anak cucunya, mampukah mereka memanfaatkannya dengan  
 sebaik-baiknya, apalagi mengolahnya secara modern dan bimbingan dari  
 pemerintah, sehingga tanah ulayat itu dapat berfungsi menurut rencana nenek  
 moyang untuk kepentingan ekonomi anak cucu.

Seorang pemimpin masyarakat adat haruslah berusaha memanfaatkan  
 tanah ulayat itu dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan seluruh anggota  
 masyarakat. Pemimpin haruslah berusaha mempertahankan tanah ulayat itu  
 supaya jangan berkurang atau habis sebagaimana bunyi pepatah : *“mamaliharo  
 harato pusako, pusako janlah sumbiang, jan djua digadaikan, amanah jan  
 sampai ilang, bangso jan pupuih, suku jan sampai baranjak.*

### 2.1.6. Peralihan

Nenek moyang mendapatkan tanah pada waktu dahulunya dengan mencengang tanah dan malateh tanah, tanah tersebut diolah dan diusahakan untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh nenek moyang tersebut, sebagian besar lagi dibiarkan dalam bentuk tidak diolah sebagai cadangan untuk menampung anak cucu kemudian harinya.

Tanah tersebut oleh nenek moyang diperuntukkan bagi kepentingan bersama seluruh masyarakat kaum secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaumnya. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah itu disebut hak ulayat. Dan tanah itu sendiri disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh penghulu kaum itu dan merupakan cadangan bagi anak cucu untuk masa yang akan datang.

Bahwasannya sifat dari tanah ulayat tidak merupakan milik perseorangan, akan tetapi berada pada masyarakat hukum adat dan tidak dapat berpindah tanah untuk selamanya. Semua anggota kaum mempunyai hak untuk mengambil manfaat dan mengusahakan tanah ulayat untuk pertanian dalam pemakaian tanah itu pelaksanaannya secara "*ganggam beruntuk*". Pemanfaatan tanah ulayat itu adalah untuk kelangsungan hidup dari anggota

hukum adat tersebut, karena itu tanah ulayat boleh diolah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa menghidupi anggota masyarakat tersebut.

Oleh karena itu tanah-tanah ulayat tadi tidak dapat dialihkan kepada orang luar, karena kalau dialihkan harta akan berkurang yang berarti berkurang pula kesejahteraan anggota masyarakat. Namun mungkin saja peralihan itu terpaksa dilakukan, kalau adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar mendesak tetapi tetap syarat utamanya untuk kesejahteraan anggota masyarakat.

Hak tanah itu telah berada pada tangan masing-masing yang mengusahakan secara hak pakai yang diawasi oleh mamak kepala waris, sehingga dengan demikian tanah ulayat merupakan tanah yang belum diolah dan dijadikan cadangan bagi kehidupan anak cucu masa yang akan datang. Pihak luar dari masyarakat hukum adat dapat pula memanfaatkannya tetapi tidak dengan cara mengalihkan hak dengan cara hak milik hanya hak pakai. Semakin berkembangnya anggota masyarakat kaum itu dapat mengolah lahan baru dengan cara menaruko tanah yang memang menurut asalnya diperuntukkan bagi cadangan untuk menghadapi perkembangan anggota kaum.

Oleh karena itu tidak dapat dialihkan yang semata-mata hanya untuk kesejahteraan anggota kaum nantinya.

Orang luar dapat pula menikmati dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut dengan hak pakai, hanya saja itu diharuskan memenuhi ketentuan adat “mengisi ada menuang limbago” dalam bentuk imbalan yang diserahkan kepada pemegang hak ulayat.

Jadi dari uraian di atas jelaslah tanah ulayat adalah untuk kepentingan anggota masyarakat dan tidak boleh dialihkan oleh karena tanah ulayat adalah hanya untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak cucu di masa yang akan datang.

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Kerapatan Adat Nagari**

### **2.2.1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari**

Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Jadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini meskipun didirikan belum beberapa tahun tetapi musyawarah dan mufakat adat ini telah dilaksanakan



juga oleh nenek moyang sejak dahulu kala sejak dilaksanakannya Hukum Adat di Minangkabau.

Sebagai bukti bahwa kerapatan itu sudah ada juga sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, terlihat di Nagari-Nagari di Minangkabau adanya Rumah Gadang Pasukuan dan Balai Adat atau Balairung milik Nagari. Masalah-masalah saling sengketa antar kaum, pelanggaran adat istiadat dibicarakan oleh penghulu di Balai Adat.

Untuk terlaksananya Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000. Pada bab VII, Pasal 19 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

Ayat (1) : Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.

Ayat (2) : Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat 91) Pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 9 Tahun 2000 yang berbunyi adalah :

Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang naik bertanggung turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas :
  - a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
  - b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat.
  - c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
  - d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
  - e. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
  - f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik

bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.

g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau masyarakat Hukum Adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik Nagari.

2. Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam rangka menjalankan Pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian bahwa keberadaan Kerapatan Adat Nagari di tengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, *'adat nan indak lapuak de hujan, nan indak lakang dek paneh'* atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan

sehingga nampaklah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

### **2.2.2. Wewenang Kerapatan Adat Nagari**

Sebagai suatu organisasi, penghulu dalam suatu Nagari, Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari
3. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara perdata adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.

5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan Nagari.
6. Sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari, para penghulu mempunyai wewenang lebih banyak hubungan ke dalam. Misalnya : masalah anak kemenakan antar kaum, sengketa tanah, meningkatkan ekonomi dengan manaruko dan sebagainya.

Seorang anggota KAN adalah juga seorang laki-laki, yang dalam adat Minangkabau mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang mamak.

Maka mamak mempunyai tugas sebagaimana ungkapan dalam pepatah adat :

*Kaluak paku kacang balimbiang  
 Tampuruang lenggang-lenggangkan  
 Baok menurun ka saruaso  
 Tanamlah siriah jo ureknyo  
 Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
 Urang kampuang dipatenggangkan  
 Tenggang Nagari jan binaso  
 Tenggang sarato jo adatnya*

(Keluk paku kacang belimbing  
 Tempurung ayun-ayunkan  
 Bawa menurun ke Saruaso  
 Tanamlah sirih dengan akarnya  
 Anak dipangku kemenakan dibimbing  
 Orang kampung ditenggang juga  
 Tenggang Nagari jangan binasa  
 Tenggang beserta dengan adatnya)

Jadi wewenang penghulu itu baik dahulu maupun sekarang yang sudah dikoordinir dengan suatu Kerapatan Adat Nagari, adalah memelihara anak kemenakan serta jorong dengan nagari untuk mencapai kehidupan yang sempurna lahir dan batin demi keadilan dan kemakmuran masyarakat. Bila wewenang ini terlaksana dengan baik dan lancar pada setiap Nagari yang ditetapkan sebagian kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dan juga dipatuhi oleh anak kemenakannya tentulah tujuan nasional akan tercapai.

### **2.2.3. Tujuan Adanya Lembaga Kerapatan Adat Nagari**

Memang akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri bahwa silang sengketa yang mewarnai pengadilan banyak sekali bersumber dari masalah harta pusaka. Silang sengketa itu ada yang bersifat individu dan ada yang bersifat antar kaum.

Masalah-masalah tersebut tentu erat sekali kaitannya dengan fungsi Kerapatan Adat Nagari di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Sebab Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga tertinggi di Nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan sako jo pusako.

Kalau dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari dapat disimpulkan tugas KAN adalah sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Menginventarisasi, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap Nagari, berjenjang naik

bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotontroyongan.

7. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama untuk Nagari atau masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

Bila dipelajari tentang sejarah berdirinya Kerapatan Adat Nagari. Hal itu adalah kebutuhan masyarakat Minangkabau dalam mengatur tata cara kehidupan masyarakat. Hal ini telah menjadi keputusan Pemerintahan yaitu keputusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat. Yang dimuat dalam buku Proses Lahirnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tentang Diadakannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Nagari di Wilayah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 diatur kembali fungsi dari Kerapatan Adat Nagari ini.



Dalam Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 terlihat dengan nyata seperti pada Pasal 14 bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga masyarakat di samping melaksanakan peradilan adat dan agama serta memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari.

Dalam Pasal 1 dari SK Gubernur itu No. 156/GSB/1974 mengatakan lagi bahwa Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat Nagari yang dipandang patut mewakili kepemimpinan suku dan jorong.

Dilihat dari fungsi Kerapatan Adat Nagari yang sekarang ini telah ditetapkan dengan Perda No. 9 tahun 2000. Jelaslah bahwa perkara yang timbul dari sako dan pusako ini adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan secara damai. Jawabnya kembali kepada pengurus Kerapatan Adat Nagari itu sendiri. Namun kalau kita lihat dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat hukum adat, fungsi Kerapatan Adat Nagari tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini sungguh mengkhawatirkan anggota masyarakat Nagari yang seolah-olah KAN hanya sebagai lambang saja atau pelengkap organisasi kekerabatan yang harus dilestarikan bukan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

## Tujuan Adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN)

### 1. Dari Segi Geografis

Dengan ditetapkannya jorong-jorong menjadi Nagari berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka jorong yang dahulu di bawah kekuasaan Pemerintah Desa sekarang sudah tidak terpisah-pisah lagi, karena sudah berada di bawah Pemerintahan Nagari. Sekaligus hubungannya satu nagari dengan nagari yang lain menjadi bersatu kembali.

### 2. Dari segi Penghulu atau Ninik Mamak

Dengan kembalinya ke Pemerintahan Nagari, maka penghulu atau ninik mamak yang dalam masa Pemerintahan Desa merasa terpisah sekarang merasa bersatu kembali dengan adanya Perda No. 9 Tahun 2000.

### 3. Dari Segi Administrasi

Dahulu sedikit para penghulu yang mengenal pengetahuan administrasi. Maka setelah keluarnya Surat Keputusan mengenai Kerapatan Adat Nagari, maka Kerapatan Adat Nagari mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Sekretaris atau manti

c. Anggota-anggota

Nagari-nagari di Sumatera Barat selama Revolusi Fisik telah menjadi basis perjuangan bangsa dan di masa Pemerintahan Orde Baru masyarakat Nagari didukung sepenuhnya oleh ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.

Peranan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan pemuda sangat menentukan dalam pencapaian tujuan Kerapatan Adat Nagari karena anggota daripada Kerapatan Adat Nagari itu meliputi “urang nan ampek jinih”.

Oleh karena itu eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan masa, sehingga syarak nan kawi adat nan lazim itu tidak dianggap kuno oleh generasi mendatang.

Dengan demikian jelaslah bahwa fungsi Nagari itu meliputi :

- a. Membina dan mengembangkan nilai-nilai dan kaidah adat di tengah-tengah masyarakat, nagari
- b. Menyelesaikan perkara-perkara adat, adat istiadat
- c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan bangsa.
- d. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis dan empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.<sup>9</sup>

#### 3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria yang merupakan korelasi dan masalah pertanahan. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 9.

### 3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturan perundangan lain, eksistensinya kehidupan masyarakat serta relevansinya, khususnya dalam pengaturan tanah adat. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>10</sup>

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Nagari Kuncir dan Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat.

### 3.4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft*

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 26-27.

*interview*) dan pengamatan (*observasi*) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui adat setempat khususnya tentang tanah adat yang disengketakan, dan warga masyarakat yang menguasai tanah adat tersebut.

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu :

- UUD 1945
- UUPA Nomor 5 Tahun 1960
- Peraturan Menteri Agraria/Kabupaten BPN Nomor 5 Tahun 1999  
tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah
- Makalah-makalah

- Hasil-hasil penelitian dan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat kedua nagari tersebut.

### 3.5. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>11</sup>

Sedangkan mengenai penentuan siapa dulu yang akan menjadi informan (*key informan*) yaitu orang yang mengetahui secara mendalam mengenai tanah adat yang ada di lapangan. Bertolak dari infoman kunci ini maka secara *snowballing* akan dilakukan penggalian data pada informan-informan lainnya hingga terjawab permasalahan penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>12</sup> Sanafiah Faisal, *Peneliti Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Ya 3, Malang, 1990.



Teknik ini adalah suatu cara dengan merujuk keterangan dari satu informan kunci dipergunakan untuk melacak informan yang lain guna melengkapi data yang diperlukan. Informan yang dipilih dalam memberikan informasi atau keterangan dalam penelitian lapangan antara lain : pertama para pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah adat. Bahwa populasi penelitian ini dilakukan di Nagari Kuncir dan Nagari Arian Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat, tetapi mengingat keterbatasan yang ada dan di samping pula atas pertimbangan pola penelitian yang dipergunakan, maka dalam penelitian *empiris* tidaklah semua populasi yang akan diteliti.<sup>13</sup>

Dari populasi penelitian akan diambil beberapa sampel yang dipandang mampu mewakili populasinya. Hal ini atas dasar pertimbangan disini yang paling formal dalam memberikan informasi adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur tanah di wilayah kekuasaannya serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada terutama tentang tanah adat (Hak Ulayat) tersebut sesuai dengan kedudukannya dan hakim perdamaian di tingkat desa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit.*, hlm. 44.

<sup>14</sup> Imam Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 23.

Keterangan yang diperoleh dari Ketua Kerapatan Adat Nagari dipergunakan sebagai bahan untuk mencari informan lain yang menguasai tanah adat untuk mendapatkan data yang lengkap.

Ketiga, peneliti juga memilih aparat pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Pejabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tingkat II Kabupaten Solok serta melakukan wawancara dengan aparat yang ada kaitannya dengan masalah pertanahan diharapkan dapat memperoleh keterangan atau informasi tentang persepsi mereka mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : <sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Kedudukan Batas-batas Tanah Ulayat yang Disengketakan antara Kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Aripan**

Kalau kita perhatikan di Minangkabau tanah ulayat adalah sama artinya dengan tanah wilayah dari suatu lingkungan masyarakat yang merupakan kumpulan dikepalai oleh seorang penghulu. Maka setiap lingkungan masyarakat yang merupakan suatu kumpulan yang dikepalai penghulu di Minangkabau mempunyai tanah ulayat masing-masing yang terdiri dari sawah, ladang, padang rumput, rimba cadangan, bukit, mata air dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah ulayat itu terdiri dari hak ulayat kaum, hak ulayat suku, hak ulayat nagari, ulayat lepas atau ulayat rajo. Ulayat kaum adalah yang terdiri atas sawah, ladang, pandam pekuburan, Ulayat suku adalah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Ulayat nagari adalah tanah

ulayat yang terdiri dari himpunan suku-suku dalam suatu nagari yang merupakan ramba cadangan suku dan kaum. Dari uraian di atas semua tanah ulayat di Minangkabau terbagi habis dalam lingkungan kaum, suku dan nagari kecuali tanah ulayat lepas yaitu tanah pegunungan dan rimba raya, rawa-rawa tidak mungkin diambil manfaatnya sesuai dengan kondisi dahulunya.

Adapun jika dilihat tanda-tanda bukti dari pada tanah-tanah yang disebutkan di atas tadi dari segi adat, maka sebagai jawabannya akan sama dengan bukti-bukti pada umumnya terdapat tanah adat diseluruh daerah lingkungan hukum adat di Indonesia. Orang hanya akan menyatakan bahwa itu tanah ulayat kami, tanah ulayat kaum kami, tanah ulayat nagari kami dan sebagainya. Dan kalau tanah itu berstatus tanah perorangan, maka orang akan menyebut tanah saya atau tanah dia.

Dalam banyak literatur maupun menurut ajaran adat Minangkabau disebutkan bahwa sebenarnya tanah-tanah ini hanya dapat dibuktikan dengan batas-batas alami, seperti dibatasi dengan tumbuhan pohon, sungai-sungai, jalan setapak dan sebagainya. Kalau sudah berupa hak suatu lingkungan masyarakat kecil atau tanah-tanah yang sudah dibuka, maka tanda-tanda itu pada mulanya adalah merupakan tanda telah diolahnya sebidang tanah dan

selanjutnya diteruskan mengolahnya supaya tanah itu tidak jatuh kepada tanah kebersamaan atau ulayat, maka di atas tanah itu ditanam tanaman tua berupa buah-buahan dan pohon-pohon yang ada untuk ditanam.

Kembali mengenai bukti atau batas-batas tanah adat menurut hukum adat Minangkabau, maka ada disebutkan bukti alami ini yakni terungkap dalam pepatah:

*Sawah nan balantak  
Ladng bamintalak  
Padang baligundi  
Bukik bakarakaratau*

Maksud pepatah di atas adalah untuk membatasi sawah ada pematangnya yang terdiri dari batu tanam dan untuk membatasi ladang ada mintalak yang terdiri dari batu, batang puding berupa tanaman yang mudah hidup dan sulit punah. Batas-batas alamiah yang ditanam atau yang diadakan ini adalah dengan sepakat pihak-pihak yang mengadakan perbatasan itu, yang mana diterima secara turun menurun oleh anak cucu mereka. Terhadap tanah-tanah yang sudah bersifat perorangan yang didapat dengan jalan beli, orang telah dapat melihat tanda-tanda suatu hak atas sebidang tanah.

Mengenai tanah ulayat yang disengketakan antara kaum Dt Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Aripin juga cukup luas, karena dengan tidak

jelasnya batas-batas tanah ulayat tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya sesuatu sengketa. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis batas-batas ulayat yang menjadi objek sengketa adalah daerah Kuncir dari arah timur berbatasan kubang ketek, kubang pandan menjurus ke selatan aur belirik, terus ke arah Balimo dan Laing.

#### **4.1.2. Sejarah Persengketaan Tanah Ulayat antara Kaum Dt Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan Masyarakat Nagari Aripin**

Sebelumnya penulis akan menjelaskan bahwa status tanah yang ada di daerah hukum sengketa pada umumnya adalah tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi dari kaum atau suku dan hanya sebagian kecil yang bersifat tanah hak milik pribadi dan tanah negara bahkan dikatakan tidak ada. Terhadap tanah-tanah hak milik pribadi atau pusaka rendah dan tanah negara tidak begitu menimbulkan sengketa, karena tanah-tanah tersebut pada umumnya telah didaftarkan atau disertifikatkan, sehingga pemiliknya telah mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti yang kuat.

Lain halnya dengan tanah yang berstatus tanah pusako tinggi atau tanah ulayat, pada umumnya tidak didaftarkan. Sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Walaupun tanah pusako tinggi atau tanah ulayat ini dimiliki oleh seluruh anggota kaum, namun dapat didaftarkan atas nama kaum olah mamak kepala waris. Tujuan untuk mencapai sasaran ini diperlukan kesadaran hukum masyarakat di dalam pendaftaran tanah.

Sebab lain terjadinya sengketa tanah ulayat juga disebabkan tidak berfungsi lagi mamak kepala waris dalam kaumnya, misalnya membimbing anak kemenakan, mengajarkan seluk beluk adat isdiadat Minangkabau, memberitahukan hak-hak ulayat dalam masyarakat hukum adat dan sebagainya.

Dalam Masalah kasus masyarakat Aripin dan Nagari Kuncir terjadi karena masyarakat Aripin merasa masalah batas nagari antara Aripin dengan Nagari Kuncir belum ada penjelasannya, lokasi pembuangan sampah milik Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dan masyarakat Aripin mengklaim bahwa perbatasan tersebut adalah ulayat Nagari Aripin. Sedangkan menurut tokoh masyarakat Kuncir tidak ada lagi persoalan batas nagari dengan warga Aripin karena batas nagari diselesaikan antara kaum pemilik ulayat kaum



masing-masing (Aripan dan Kuncir) begitu juga dengan masalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah sudah final, karena tanah milik masyarakat Kuncir (hak milik jual kepada Pemda).

Dari pernyataan masyarakat Aripan dan Kuncir sebenarnya sudah mempunyai surat pernyataan yang ditandatangani atau diketahui oleh kedua belah pihak dan pejabat Pemda Kabupaten Solok.

Selain itu masyarakat Kuncir dalam hal ini kaum Dt. Rajo lelo mempunyai surat-surat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun masyarakat Aripan menerima pernyataan itu tanpa mencari bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2000 datanglah sekelompok masyarakat Nagari Aripan lebih kurang 500 orang melakukan penyerbuan dengan tindakan brutal, pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah dan tanaman masyarakat Kuncir yang mendirikan rumah di lokasi tanah sengketa. Terhadap penyerbuan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Nagari Aripan tanpa mendapat perlawanan dari masyarakat Nagari Kuncir karena memang masyarakat Kuncir tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut karena peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.40 WIB dimana orang-orang lagi sibuk dengan aktivitas masing-masing, apalagi lokasi tanah

ulayat yang disengketakan jauh dari keramaian, baik masyarakat Angari Arian maupun masyarakat Nagari Kuncir.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Nagari Arian tidak mengetahui dengan sebenarnya dari pernyataan-pernyataan yang dibuat sebelumnya.

#### **4.1.3. Motivasi Masyarakat Nagari Arian dalam Persengketaan Tanah**

##### **Ulayat Tersebut**

Lokasi tanah ulayat yang menjadi objek sengketa kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Arian sebelumnya adalah tanah kosong yang tidak dikerjakan olah anak Nagari Kuncir, tetapi kira-kira 20 tahun terakhir sudah ada yang menggarap tanah untuk dijadikan perumahan dan lahan pertanian. Yang menggarap tanah tersebut adalah anggota kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir. Letak tanah ulayat tersebut di sepanjang jalan raya Solok-Paninjouan, tidak jauh dari kota Solok dan sangat strategis sampai sekarang masyarakat yang menggarap tanah menjadi lahan pertanian sudah menampakkkan hasil yang cukup baik.

Dari uraian di atas cukup lama masyarakat Nagari Kuncir membangun menggarap lahan kosong tersebut akhirnya habis sia-sia tanpa mengecap hasil

jerih payah mereka selama ini. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Nagari Aripin dan apa tujuan utama masyarakat Nagari Aripin melakukan penyerbuan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.

Masyarakat Nagari Aripin mengklaim bahwa tanah perbatasan tersebut adalah ulayat Nagari Aripin. Namun tokoh masyarakat Nagari Aripin tidak memiliki surat bukti atau surat-surat tanah yang menjadi objek sengketa sebagai bukti ia memiliki tanah tersebut. Oleh sebab itu merupakan suatu pertanyaan besar dari masyarakat Nagari Kuncir terutama bagi penulis. Walaupun masyarakat Nagari Aripin menganggap adalah ulayat Nagari Aripin, mengapa tidak sejak awal mencegah masyarakat Nagari Kuncir mendirikan bangunan dan mengolah lahan tersebut. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat Nagari Kuncir, Pemda Solok yang melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak merasa bingung dan tidak mengerti atas pertanyaan tokoh masyarakat Nagari Aripin bahwa tanah tersebut adalah ulayat Nagari Aripin. Sedangkan mereka tidak memiliki bukti bahkan masyarakat Nagari Kuncir sudah menegaskan, kalau memang tanah ulayat tersebut adalah ulayat Nagari Aripin ajukanlah gugatan ke Pengadilan Nagari tetapi masyarakat Nagari Aripin tidak melakukannya karena bukti

kepemilikan tanah tidak ada. Akhirnya berdasarkan kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Aripin dan Kuncir dihadiri oleh unsur Muspida TK II Kabupaten Solok dan pimpinan DPRD Kabupaten Solok masyarakat Nagari Aripin mengakui status tanah ulayat tersebut adalah milik kaum dan masyarakat Nagari Kuncir.

#### **4.1.4. Akibat Hukum dari Tindakan Masyarakat Nagari Aripin Dalam Mengambil Alih Tanah Ulayat Secara Paksa**

Sebagaimana penulis telah menguraikan dengan jelas bahwa telah terjadi suatu peristiwa penyerbuan terhadap masyarakat Nagari Kuncir oleh masyarakat Nagari Aripin dengan tindakan brutal, pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah dan tanaman masyarakat Nagari Kuncir yang mendirikan rumah di lokasi tanah sengketa dengan tujuan mengambil alih tanah ulayat tersebut secara paksa merupakan tindakan melanggar hukum.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Aripin, pihak yang merasa dirugikan telah melakukan pengaduan atas pembakaran, pengrusakan rumah dan tanam-tanaman kepada kapolres Solok untuk melakukan penyelidikan dan proses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Warga masyarakat Nagari Kuncir yang mengajukan pengaduan kepada Kapolres Solok adalah : Miskardi dan Nurhidayati, S Pd (suami istri) bahwa : Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2000 sekitar pukul 08.40 WIB di saat kami tidak ada di rumah karena pagi melaksanakan tugas di sekolah. Datanglah sekelompok masyarakat Nagari Arian Kecamatan X Koto Dibawah Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat yang jumlahnya lebih kurang 500 orang, melakukan tindakan brutal, pembakaran dan pengrusakan terhadap rumah kami dan tanaman.

Akibat tindakan brutal tersebut mereka sangat dirugikan, baik secara moril maupun materiil. Adapun kerugian materiil yang dialami mencapai Rp. 16.885.000,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang perinciannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Warga lain yang mengalami kerugian juga mengajukan pengaduan kepada Kapolres Solok adalah Kinar. E dan Sumardi, keduanya adalah warga Dusun Binari Desa Baringin Kuncir Kecamatan Koto Diatas Kabupaten Solok Bawah :

Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2000, sekitar jam 08.40 WIB yang bertempat di Simpang Kuncir, Dusun Binari, Desa Baringin Kuncir,

Kecamatan X Kota Diatas, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, telah terjadi peristiwa tindakan brutal pembakaran/pengrusakan rumah dan tanam-tanaman kita oleh sekelompok masa (lebih kurang 500 orang) yang dikomandoi saudara :

1. Zulkifli M
2. Ad. Dt. Rangkayo Basa (Duin)
3. R. Dt. Majo Lelo.

Ketiganya warga masyarakat nagari Aripan, Kecamatan X Koto Dibawah, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat

Akibat tindakan tersebut, Kinan E dan Sumardi merasa sangat dirugikan, baik secara moril maupun materil. Adapun kerugian materil yang dialami adalah sebesar Rp. 69.870.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang perinciannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Beberapa Jenis Sengketa Tanah Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Solok Pada Umumnya**

Berdasarkan penelitian penulis pada Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Kabupaten Solok dan Ketua Kerapatan Adat Nagari dalam lingkungan Nagari di daerah Kabupaten Solok, jenis sengketa tanah ulayat yang sering terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat Kabupaten Solok sebagai berikut :

#### **1. Warisan**

Sengketa tanah yang terjadi berasal dari harta pusaka rendah, hal ini terjadi dalam suatu kaum dimana kaum dengan mamak kepala warisnya berhak atas sebidang tanah pusaka dan waris yang lain merasa dirugikan. Menurut hukum adat sengketa yang demikian diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari. Bila salah satu pihak tidak puas atas putusan ninik mamak, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Solok, tetapi masih ada sebagian masyarakat Solok bagi pihak yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tanpa menyelesaikan masalah tersebut menurut hukum adat

setempat, karena masyarakat hukum adat merasa tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari.

## 2. Jual Beli

Tanah yang disengketakan adakalanya berasal dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau umumnya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali batas-batas yang ditentukan oleh adat, misalnya untuk menutup malu atau membangkit batang tarandam, inipun harus melalui mufakat dalam kaum. Begitu juga dengan jual beli tanah yang berasal dari harta pusaka rendah atau tanah yang berasal dari ulayat suku, bila terjadi jual beli diluar batas-batas yang ditentukan adat, kemudian bila putusan tidak memuaskan maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Bahkan ada juga yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena menurut hukum adat keputusan adat tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti.



### 3. Sewa Menyewa

Sebagian besar dilakukan di bawah tangan tanpa disaksikan ninik mamak. Yang melakukan transaksi ini hanya para pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Sengketa ini terjadi ketika yang merasa berhak atau dirugikan atas tanah transaksi tersebut sengketa sewa menyewa ini dapat diselesaikan oleh para ninik mamak dalam kaum di nagari yang bersangkutan. Tetapi bila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan ninik mamak, maka ninik mamak tidak menghalangi pihak tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Nagari.

#### **4.2.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Dt. Rejo Lelo di Kabupaten Solok**

Dalam meningkatnya penambahan penduduk yang sangat pesat dan meningkatnya kebutuhan perekonomian, sedangkan tanah yang tersedia tidak ada penambahannya. Hal ini menimbulkan masalah terutama dalam pertanian, perumahan dan lain-lain. Hal ini pula yang mendorong sebagian masyarakat Nagari Kuncir untuk membuka lahan baru di atas tanah ulayat kaum mereka masing-masing yang semula merupakan tanah kosong. Dengan keberhasilan yang dicapai masyarakat Nagari Kuncir membuka lahan pertanian dan

perumahan masyarakat Nagari Aripa merasa tidak senang dan mereka mengklaim bahwa tanah ulayat Nagari Kuncir itu adalah tanah ulayat Nagari Aripa, tetapi sampai sekarang tidak ada lagi hak mereka atas tanah itu, karena tanah ulayat tersebut dijual oleh masyarakat Aripa dan juga telah membuka lahan pertanian oleh pihak yang membelinya. Pada dasarnya masyarakat Aripa juga telah melanggar aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, dimana di atas tersebut sudah ada pelanggaran untuk mendirikan bangunan di lokasi Pekan Penghijauan Nasional (PPN) tahun 1982 dimana tanah tersebut telah diserahkan oleh anggota kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir kepada Pemda Kabupaten Solok, namun larangan itu tidak digubris masyarakat Aripa. Disini terlihat bahwa Pemda Kabupaten Solok tidak begitu aktif dalam mengontrol terhadap masyarakat yang melanggar aturan. Selama ini pihak yang merasa memiliki tanah tersebut tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada tindakan dari pemerintah. Pada tanggal 28 Oktober 2000 masyarakat Aripa juga mencoba merampas tanah ulayat kaum masyarakat Nagari Kuncir yang dipelopori oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kerapatan Adat Nagari dengan melakukan penyerbuan atau pembakaran atau pengrusakan rumah dan

tanam-tanaman masyarakat Nagari Kuncir lokasinya bersebelahan dengan lokasi Pekan Penghijauan Nasional (PPN) tahun 1982.

Atas pembrutalan yang dilakukan masyarakat Aripin sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pun telah turun tangan dalam menyelesaikan masalah tersebut, karena pihak yang telah dirugikan melakukan pengaduan berkaitan dengan sengketa tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Sebelum menyelesaikan masalah batas Nagari dan tanah ulayat Nagari Aripin dan Nagari Kuncir, tokoh masyarakat Nagari Aripin dan masyarakat Nagari Kuncir, yaitu anggota Kerapatan Adat Nagari dan unsur pemuda masing-masing Nagari melakukan kesepakatan sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan masalah batas Nagari Aripin dan Nagari Kuncir dilakukan melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak dapat musyawarah mufakat, maka pihak yang dirugikan dipersilakan melalui jalur hukum perdata ke pengadilan.
2. Penyelesaian masalah batas Nagari melalui musyawarah akan dilakukan oleh Perwakilan Tokoh masyarakat kedua Nagari pada hari Senin tanggal 3

April 2000, bertempat di gedung DPRD Kabupaten Solok pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh :

- Utusan masing-masing Nagari sebanyak 15 orang
  - Muspida / Pimpinan DPRD Kabupaten Solok
  - Instansi terkait
  - LKAM kecamatan masing-masing.
3. Penyelesaian kasus pembakaran rumah penduduk dan kebun milik warga Nagari Kuncir oleh warga Nadari Aripin tersebut Polres akan menyelidiki dan menuntut secara hukum pidana kepada pelaku.
  4. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian pembakaran masing-masing pihak akan membantu sepenuhnya.
  5. Masing-masing pihak baik masyarakat Nagari Aripin dan masyarakat Nagari Kuncir tidak akan melakukan tindakan main hakim sendiri dan akan sama-sama menahan diri serta mematuhi isi kesepakatan.

Berdasarkan kesepakatan antara Nagari Aripin dan masyarakat Nagari Kuncir di atas dilakukan musyawarah di gedung DPRD Kabupaten Solok tanggal 3 April 2000 dengan memberikan saran penyelesaian antara lain :

1. Apabila tidak terdapat musyawarah mufakat untuk menentukan batas nagari (tanggal 3 April 2000), maka kepada pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
2. Persoalan batas hendaknya jangan dibawa ke lingkup yang lebih luas (nagari), tetapi harus diperkecil menjadi lengkungan kaum yang berbatasan ulayat.
3. Karena perbuatan penyerbuan merupakan perbuatan melanggar hukum maka penyelesaian harus melalui jalur hukum.

Guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dan untuk menghindari terulang kembali terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Solok dan Muspida telah melakukan upaya penyelesaian dengan memprakarsai pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak terakhir tanggal 11 April 2000 yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Solok. Pada rapat/musyawarah tanggal 11 April 2000 tersebut telah didapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan penyelesaian kasus persengketaan ini sebagai berikut :

1. Status hak atas tanah di lokasi kejadian tanggal 28 Maret 2000 diakui oleh semua pihak keberadaannya dan tidak akan diganggu gugat.

2. Tanah-tanah lain yang telah bersertifikat di lokasi sekitar perbatasan Nagari Kuncir – Aripin diserahkan foto copynya oleh ketua KAN Kuncir kepada ketua KAN Aripin dan apabila pihak-pihak merasa dirugikan akan mengajukan gugatan melalui jalur hukum dan bahkan merupakan masalah nagari.
3. Semua pihak sepakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan.
4. Bagi yang melanggar hukum dan ketertiban akan diproses menurut ketentuan yang berlaku.

Pada saat penulis melakukan penelitian dan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Nagari Kuncir sebagai bukti bahwa tanah ulayat itu adalah milik masyarakat Nagari Kuncir adalah pada poin 1 dan tidak bisa dipungkiri bahwa tanah ulayat tersebut adalah milik kaum Nagari Kuncir. Hasil kesepakatan atau musyawarah kedua belah pihak di atas pada poin 1 sampai 3 memang sudah selesai, bagaimana dengan poin 4 bahwa bagi yang melanggar hukum dan ketertiban akan diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Jelas bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Aripin atas pemabkaran/pengrusakan rumah dan tanam-lanaman itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Sejak Maret 2000 sampai sekarang tidak ada tindakan Polres Solok untuk menindak lebih lanjut terhadap para pelaku kerusuhan itu. Bahkan menurut salah satu korban dari tindakan penyerbuan itu ia pernah melayangkan surat kepada kepolisian mengenai tindak lanjut proses hukumnya. Namun hasilnya nol dan tidak ada tanggapan dari Kepolisian, sedangkan para pelaku penyerbuan itu tetap berkeliaran menikmati hidup di alam bebas tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana hak kami sebagai warga negara Indonesia untuk menuntut keadilan. Itulah sedikit jeritan hati warga masyarakat Nagari Kuncir yang menderita kerugian yang sangat besar akibat perbuatan masyarakat Nagari Aripin tersebut.

Sampai sekarang masyarakat Nagari Kuncir yang mengalami kerugian itu tetap menunggu kebijaksanaan pihak yang berwajib untuk melanjutkan penyelidikannya atas kasus ini. Untuk sementara pihak warga masyarakat Nagari Kuncir yang disebutkan sebelumnya, mengambil inisiatif sendiri-

sendiri untuk memperbaiki rumah dan tanam-tanaman mereka yang dirusak dan dibakar oleh masyarakat Nagari Kuncir.

#### **4.2.3. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Dt. Rajo Lelo Melalui**

##### **Kerapatan Adat Nagari (KAN)**

Menurut ajaran adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kapala waris dalam kaum. Kemudian bila putusan tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan.

Berdasarkan fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari seperti diatur dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2001 : Kerapatan Adat Nagari sebagai mana tersebut pada Pasal 99 berfungsi membina dan mengembangkan serta memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sengketa sako dan pusako dalam nagari.

Dalam sengketa antara masyarakat Nagari Aripin dengan masyarakat Nagari Kuncir dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari. Dimana masing-masing Kerapatan Adat Nagari (Aripin-Kuncir) melakukan musyawarah dan hal ini dilakukan secara pribadi antara salah seorang pengurus KAN Aripin dan Kuncir dapat menerima bahwa tanah tersebut



adalah milik warga masyarakat Nagari Kuncir, tetapi anggota yang lain tidak mengakuinya, itulah sebabnya tidak ada kesepakatan antara Kerapatan Adat Nagari Arian dengan Kerapatan Adat Nagari Kuncir.

Sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai pada musyawarah tanggal 11 April 2000 antara masyarakat Nagari Arian dengan masyarakat Nagari Kuncir yang masing-masing diwakili oleh pengurus KAN, satu orang unsur pemuda, serta dihadiri oleh unsur Muspida Kabupaten Solok dan pimpinan DPRD Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Status hak atas tanah dilokasi kejadian tanggal 28 Maret 2000 diakui oleh semua pihak keberadaannya dan tidak diganggu gugat.
2. Tanah-tanah lain yang telah bersertifikat dilokasi sekitar perbatasan nagari kuncir dan arian diserahkan foto kopinya oleh ketua KAN Nagari Kuncir kepada ketua KAN Nagari Arian dan apabila pihak-pihak merasa dirugikan akan mengajukan gugatan melalui jalur hukum dan bukan merupakan masalah Nagari.
3. Semua pihak sepakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan.

4. Bagi yang melanggar hukum dan ketertiban akan diproses menurut ketentuan yang berlaku.

Untuk menghindari terulangnya kembali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, diminta pada ketua KAN Kunci Kecamatan X Koto Diatas agar dapat melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada seluruh lapisan masyarakat isi dari kesepakatan tersebut sehingga mereka betul-betul memahami dan mematuhi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Terjadinya suatu sengketa tanah ulayat di dalam masyarakat hukum adat pada umumnya disebabkan antara lain :
  - a. Kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat dalam pendaftaran tanah
  - c. Tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya.

Sehubungan dengan sengketa tanah ulayat antara kaum Dt. Rajo Lelo dengan masyarakat Nagari Aripin, menurut pengamatan penulis sengketa ini terjadi karena kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat tersebut dan tidak berperannya mamak kepala waris dalam kaumnya serta tidak berfungsinya Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Hal ini dapat dilihat dalam tindakan masyarakat Nagari Aripin yang dapat merugikan masyarakat Nagari Kuncir tanpa melakukan suatu musyawarah untuk menempuh upaya perdamaian tanpa ada kekerasan.
2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi antara kaum Dt. Rajo Lelo Nagari Kuncir dengan masyarakat Nagari Aripin oleh Kerapatan

Adat Nagari, dimana masing-masing (Aripan-Kuncir) melakukan musyawarah namun tidak ada suatu kesepakatan berarti masing-masing Kerapatan Adat Nagari.

3. Keputusan akhir yang diperoleh dalam musyawarah yang dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Solok yang dihadiri oleh wakil kedua nagari, pengurus KAN Muspida Kabupaen Solok dan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok sebagai berikut :
  - a. Status hak atas tanah di lokasi kejadian tanggal 28 Maret 2000 diakui oleh semua pihak keberadaan dan tidak dapat diganggu gugat.
  - b. Tanah-tanah lain yang sudah bersertipikat di lokasi sekitar perbatasan Nagari Kuncir dan Aripan diserahkan foto copynya oleh Ketua KAN Nagari Kuncir kepada Ketua KAN Nagari Aripan dan apabila pihak-pihak meras dirugikan akan mengajukan gugatan melalui jalur hukum dan bukan merupakan masalah nagari.
  - c. Semua pihak sepakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan semangat kekeluargaan.
4. Bagi yang melanggar hukum dan ketertiban akan di proses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## 5.2. Saran

1. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum pihak yang memiliki tanah ulayat sebagaimana didaftarkan sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut. Apabila satu pihak tidak senang atas kepemilikan dari pihak lain jangan menyelesaikan masalah ini secara emosional dan main hakim sendiri. Kiranya baik masyarakat maupun kedua belah pihak mengadakan musyawarah dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari.
2. Terjadinya kasus penyerbuan, pembakaran atau pengrusakan rumah dan tanam-tanaman oleh warga masyarakat Nagari Aripin terhadap warga Nagari Kuncir yang mengalami kerugian yang sangat besar. tindakan brutal yang dilakukan masyarakat Nagari Aripin merupakan perbuatan melanggar hukum dan harus diambil tindakan menurut jalur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Terhadap kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat Nagari Kuncir sebelum mendapat ganti rugi dari yang diduga sebagai pelaku merusahan 28 Maret 2000, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mungkin dapat memberikan sedikit bantuan materiil kepada kedua korban kerusuhan tersebut.
4. Dalam masalah batas Nagari Aripin dan Nagari Kuncir tidak sama dengan masalah batas tanah ulayat, karena biasanya batas Nagari satu

dengan lain ditandai dengan sebuah tugu dan tidak bisa dipedomani untuk menentukan batas tanah ulayat. Berdasarkan hal ini penulis mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Solok pada umumnya. Masyarakat Nagari Arian dan masyarakat Nagari Kuncir pada khususnya yang bersengketa, karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui beda batas Nagari dengan batas ulayat agar tidak terulang kembali kejadian yang tidak diinginkan.

5. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (pendaftaran tanah adat) untuk menghindarkan terjadinya sengketa, kiranya perlu diberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan usaha-usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan memanfaatkan potensi lembaga adat untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah tanpa melakukan kekerasan dan melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Faisal, Sanafiah. 1990. *Peneliti Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Ya3. Malang.
- Hakimi, D. Dt. R. Penghulu. *Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*. Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Propinsi Sumatera barat.
- Hadikusumo, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, 1995.
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. PT Singgalang Press. Padang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan III. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- S, Nasution. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Sudiyat, Imam. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Liberty. Yogyakarta.
- Sihombing, Herman. 1979. *Prasarannya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*. tanggal 7 – 11 September 1971 di Padang.

### B. Makalah

- H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah Disampaikan pada Pelatihan Pemantapan Administrasi Managemen Kelembagaan Adat Alam Minangkabau. Bagi Pengurus KAN, Penghulu Suku, LKAAM dan Bundo Kanduang se-Kota Padang. Tanggal 21- 31 Agustus 2000.

### **C. Undang-Undang/Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang  
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-  
pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan  
Nagari.